

TANTANGAN STRUKTURAL DI BALIK KEBIJAKAN INJEKSI LIKUIDITAS



RANGKUMAN UTAMA:

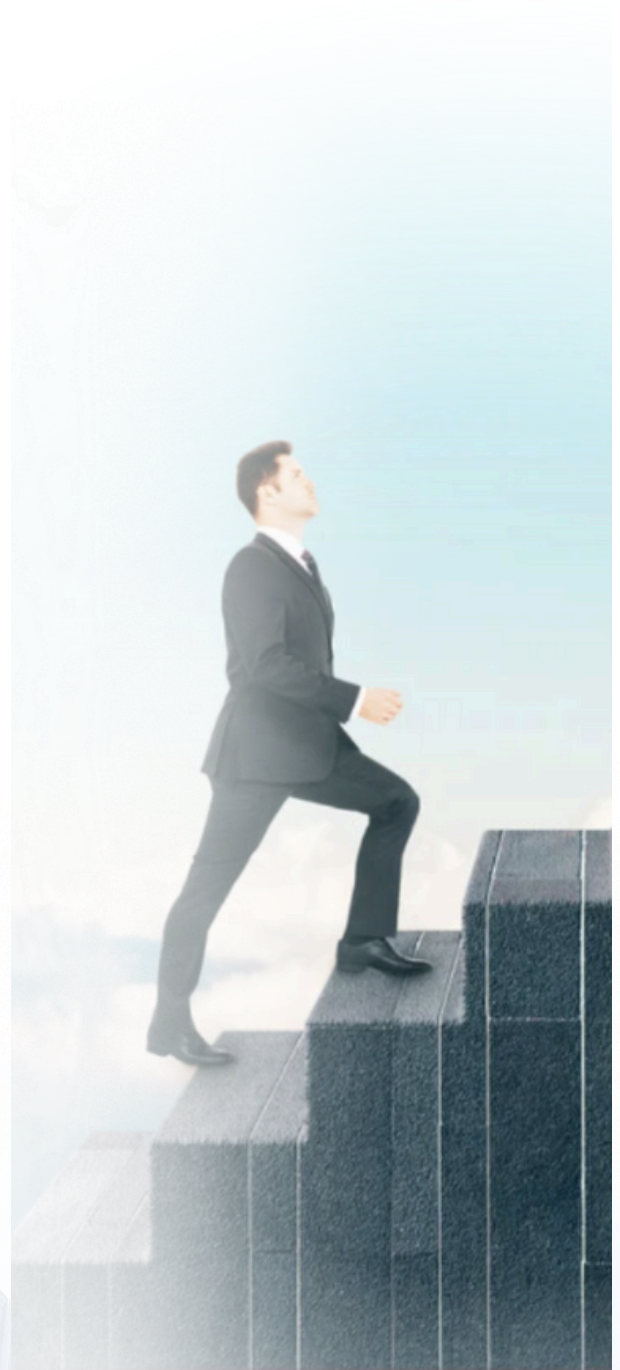
- Reformasi fiskal yang dijanjikan oleh pemerintah, pascapergantian struktur kementerian, perlu didasarkan pada upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Target pertumbuhan 8% tidak hanya tidak realistis, tetapi juga akan dinikmati oleh siapakah pertumbuhan tersebut? Pemerintah harus memikirkan aspek inklusivitas.
- Dominasi sektor informal semakin mengkhawatirkan dengan 59% pekerja (86,6 juta orang) bergantung pada sektor ini. Sektor informal tumbuh 3,2%, empat kali lebih cepat dari sektor formal (0,8%) sepanjang 2021–2025. Aktivitas ekonomi informal mencapai 36% terhadap PDB, jauh melampaui negara tetangga seperti Vietnam (27%) dan Malaysia (9%).
- Meski angka kemiskinan turun menjadi 8,47%, Indeks Kedalaman Kemiskinan justru meningkat, menunjukkan bahwa mereka yang tetap miskin mengalami kondisi lebih berat. Terjadi disparitas geografis: kemiskinan turun 430 ribu jiwa di desa tapi naik 220 ribu jiwa di kota, menandakan kegagalan transformasi struktural perkotaan.
- Kelompok 10% terkaya menguasai lebih dari 40% pendapatan nasional, sementara 50% terbawah hanya memperoleh 13–17%. Kesenjangan akses pendidikan ekstrem: kuintil terkaya memiliki peluang 9x lebih besar masuk perguruan tinggi dibanding kuintil termiskin (25,03% vs 2,79%). Kebijakan perpajakan seperti *tax holiday* dan *tax amnesty* secara sistematis juga lebih menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi.
- Namun respons kebijakan otoritas fiskal yang berencana menyalurkan dana Rp200 triliun ke Bank Himbara sejauh ini belum menyentuh kepada akar masalah ketimpangan ekonomi yang menjadi keresahan publik dan menyulut demonstrasi beberapa waktu lalu.
- Kebijakan injeksi likuiditas di Bank Himbara ini justru berpotensi menimbulkan permasalahan baru, seperti memperdalam ketimpangan dan dana mengalir ke aktivitas yang tidak produktif. Sampai saat ini belum ada mekanisme detail bahwa dana tersebut harus disalurkan secara *targeted* untuk aktivitas ekonomi di sektor riil.

Menteri Keuangan yang baru dilantik langsung mengumumkan serangkaian kebijakan ambisius. Target pertumbuhan ekonomi hingga 8% hingga rencana injeksi likuiditas Rp200 triliun ke sektor perbankan. Meski menggunakan pendekatan baru, efektifitas kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masih meninggalkan pertanyaan besar.

Di tengah permintaan kredit domestik yang masih lemah akibat melambatnya kondisi perekonomian dari sisi *demand*, injeksi likuiditas Rp200 triliun berisiko tidak efektif jika tidak dibarengi dengan stimulus fiskal yang mampu mendorong permintaan agregat. Kebijakan ini memerlukan sinkronisasi dengan kebijakan fiskal lain yang tepat sasaran untuk mendorong *demand*, sehingga likuiditas yang disuntikkan dapat terserap optimal oleh sektor riil.

Lebih jauh, masyarakat masih menunggu bagaimana kebijakan fiskal memperbaiki masalah struktural mendasar seperti dominasi pekerja sektor informal, ketimpangan yang mengakar, dan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Langkah nyata dari pemerintah melalui kebijakan fiskal menjadi penting karena menjadi latar belakang terjadinya tuntutan demonstrasi beberapa pekan yang lalu.

Dari analisis ini, setidaknya ada tiga catatan penting terkait persoalan struktural ekonomi Indonesia yang justru perlu diperlukan di luar kebijakan injeksi likuiditas: *pertama*, tantangan mewujudkan target pertumbuhan 8% di tengah deindustrialisasi; *kedua*, penciptaan lapangan kerja yang masih terbatas; *ketiga*, lingkaran kemiskinan dan ketimpangan struktural yang belum terputus.



1. TARGET PERTUMBUHAN 8%: ANTARA AMBISI DAN REALITAS

Kebijakan injeksi likuiditas mencerminkan diagnosis yang keliru terhadap persoalan ekonomi Indonesia saat ini. Kebijakan ini bertujuan mendorong perekonomian melalui tambahan likuiditas untuk penyaluran kredit, padahal masalah sebenarnya bukanlah keterbatasan dana di sistem perbankan, melainkan lemahnya permintaan domestik yang menyebabkan kredit tidak tersalur optimal.

Kondisi ini tercermin dari fenomena kelebihan likuiditas perbankan. Data *undisbursed loan* Juni mencapai Rp 2.304 triliun, naik 9% dari tahun lalu, menunjukkan komitmen kredit yang telah disetujui namun tidak dicairkan akibat perlambatan ekonomi dan suku bunga yang masih tinggi. Pertumbuhan kredit perbankan juga melambat dari 7,72% pada Juni menjadi 7,03% pada Juli 2025, sementara kredit ke sektor manufaktur turun drastis dari 11% menjadi 6% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Perlambatan ini sejalan dengan kondisi permintaan domestik yang tertekan. Konsumsi rumah tangga menghadapi perlambatan akibat tertekannya daya beli kelas menengah, sementara sektor swasta masih dalam posisi *wait and see* menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan domestik. Penambahan likuiditas justru akan menciptakan dana menganggur dan melenceng dari tujuan kebijakan.

Kondisi ekonomi semakin mengkhawatirkan dari perspektif struktural. Kontribusi manufaktur nonmigas terhadap PDB merosot drastis dari 27,4% pada 2005 menjadi hanya 16,9% di kuartal II 2025. Sebaliknya, sektor pertanian menyerap hampir 29% tenaga kerja tetapi hanya menyumbang 12,3% PDB, menunjukkan produktivitas rendah dan ketimpangan struktural yang parah. **Struktur ekonomi rapuh ini membuat visi pertumbuhan 8% semakin sulit direalisasikan tanpa transformasi struktural mendalam.**

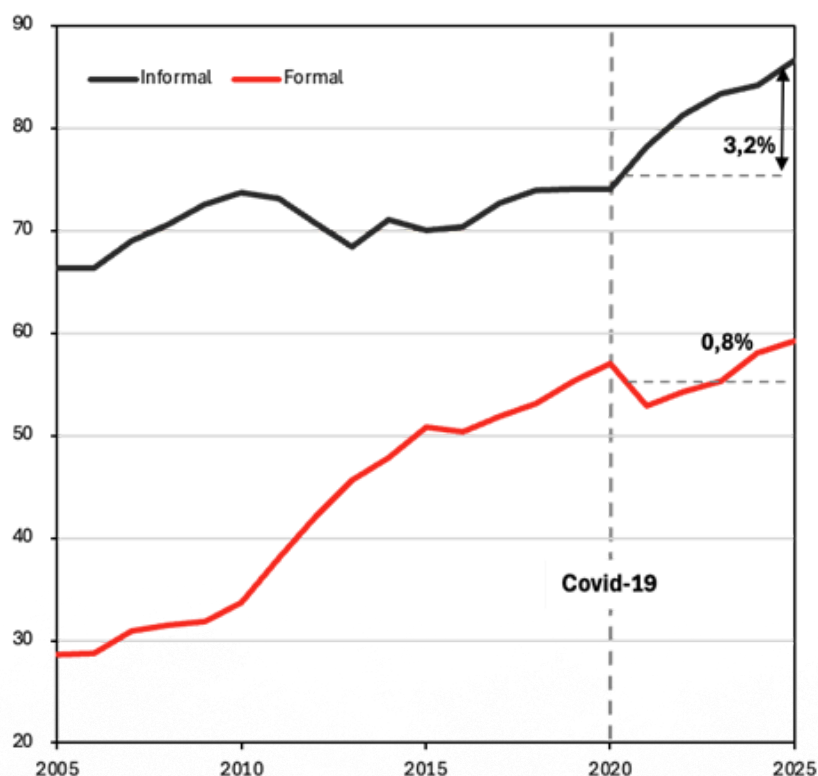
Pengalaman internasional membuktikan perlunya pendekatan berbeda. Vietnam berhasil mempertahankan kontribusi manufaktur di atas 20% PDB sambil mencapai pertumbuhan konsisten 6-7% per tahun. Tiongkok meraih pertumbuhan dua digit pada 1990-2010 melalui ekspansi masif sektor manufaktur yang didukung kebijakan industri tepat sasaran. Kedua negara ini membuktikan bahwa pertumbuhan tinggi hanya bisa dicapai melalui transformasi struktural yang konsisten, bukan sekadar injeksi likuiditas jangka pendek yang bersifat simptomatik.

Melihat kondisi permintaan domestik yang lesu dan struktur ekonomi yang rapuh, injeksi likuiditas Rp200 triliun tampaknya kurang tepat sebagai solusi utama. Kebijakan ini berpotensi tidak optimal apabila tidak diikuti kebijakan memperkuat fondasi ekonomi riil. Stimulus fiskal yang lebih tepat sasaran untuk mendorong permintaan domestik, dikombinasikan dengan reformasi struktural bertahap untuk menguatkan sektor manufaktur, akan memberikan dampak yang lebih optimal bagi perekonomian Indonesia.

2. PERTUMBUHAN LAPANGAN KERJA TANPA KUALITAS

Sejalan dengan tantangan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja di Indonesia menghadapi persoalan serius terkait kualitas lapangan kerja. **Dari total 145,7 juta tenaga kerja per Februari 2025, sebanyak 59% atau 86,6 juta orang masih bergantung pada sektor informal.** Angka ini meningkat dibanding 2015, ketika jumlah tenaga kerja informal tercatat 70 juta orang atau 57,9%.

Tren informalitas ekonomi semakin menguat dalam lima tahun terakhir. Sepanjang 2021–2025, rata-rata pertumbuhan tenaga kerja informal mencapai 3,2% per tahun, sementara sektor formal hanya 0,8%. Pada 2025 saja, tenaga kerja informal bertambah 2,45 juta orang, jauh melampaui tambahan tenaga kerja formal yang hanya 1,14 juta.



Grafik 1. Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Informal dan Formal (Juta Orang)
Sumber: BPS (diolah)

Dibandingkan dengan negara tetangga, posisi Indonesia jauh tertinggal. **Rata-rata aktivitas ekonomi informal di Indonesia setara 36% PDB pada 2011–2019, jauh lebih tinggi dari Vietnam (27%) dan Malaysia (9%)** (Hapsari et al. 2023). Tingginya tingkat informalitas ini lahir dari sejumlah faktor struktural yang saling terkait.

Pertama, sektor pertanian masih menjadi lumbung pekerjaan informal. Lebih dari 65% output sektor ini tergolong informal, dengan sekitar 90% tenaga kerja berstatus pekerja lepas harian. Minimnya mekanisasi membuat sektor pertanian menyerap banyak pekerja berupah rendah tanpa jaminan kerja.

Kedua, deindustrialisasi yang menekan daya serap manufaktur membuat angkatan kerja terpaksa beralih ke sektor informal. Hilangnya lapangan kerja formal di sektor industri manufaktur dikompensasi dengan membanjirnya tenaga kerja di sektor informal.

Ketiga, sektor jasa yang kini mendominasi PDB juga mayoritas beroperasi dalam skala mikro. Sebanyak 99,9% unit usaha adalah usaha kecil yang bergerak di perdagangan, transportasi, dan konstruksi—bidang yang bernilai tambah rendah dan jarang menyediakan pekerjaan formal dengan keterampilan tinggi.

Lebih dalam lagi, **iklim usaha yang mahal dan tidak efisien memperkuat informalitas**. Biaya perizinan, praktik korupsi, hingga premanisme membuat investor kecil dan menengah enggan membangun bisnis dengan karyawan tetap. Akibatnya, usaha menengah dan besar hanya berjumlah 66 ribu unit atau 0,1% dari total usaha di Indonesia.

Dampaknya, banyak pekerja produktif terjebak dalam pekerjaan setengah menganggur (*underemployment*) atau paruh waktu. Per Februari 2025, jumlahnya mencapai 49,3 juta orang atau 32% dari total angkatan kerja, naik 38% dibanding 2015. Fenomena ini bahkan meluas ke kota, di mana proporsi pekerja informal naik dari 44,6% pada 2015 menjadi 50% pada 2025.

Pada akhirnya, **dominasi sektor informal berimplikasi langsung pada rendahnya kesejahteraan**. Data upah menunjukkan jurang yang jelas: rata-rata pekerja formal memperoleh upah bersih Rp3,09 juta per bulan, sedangkan pekerja lepas nonpertanian hanya Rp2,03 juta, dan pekerja lepas pertanian bahkan lebih rendah, Rp1,38 juta.

Banyak **pekerja produktif terjebak** dalam pekerjaan setengah menganggur (*under-employment*) atau paruh waktu.

Per Februari 2025,

jumlahnya mencapai 49,3 juta orang atau 32% dari total angkatan kerja, naik 38% dibanding 2015.

Fenomena ini bahkan meluas ke kota, di mana proporsi pekerja informal naik dari 44,6% pada 2015 menjadi 50% pada 2025.

3. LINGKARAN SETAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN STRUKTURAL

Buruknya kualitas lapangan kerja yang telah diuraikan di atas bermuara pada masalah yang lebih kompleks: lingkaran setan kemiskinan dan ketimpangan struktural yang saling memperkuat. Kedua fenomena ini tidak bisa dipisahkan karena saling mempengaruhi dalam menciptakan jebakan kemiskinan yang sulit diputus.

A. Ketimpangan Struktural yang Mengakar

Ketimpangan masih menjadi akar masalah utama ekonomi Indonesia. **Kelompok 10% teratas konsisten menguasai lebih dari 40% pendapatan sejak 1992 hingga 2019, sedangkan 50% terbawah hanya memperoleh 13-17%** (World Inequality Database, 2022). Bahkan pada 2020, di tengah pandemi yang meningkatkan kemiskinan, jumlah orang dengan kekayaan lebih dari US\$100 juta meningkat 22,29% dari 341 orang menjadi 417 orang. Sebaliknya, jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 27,55 juta jiwa, meningkat 2,76 juta orang dibanding 2019.

Ketimpangan ini diperkuat oleh kesenjangan akses yang ekstrem. Dalam hal pendidikan, Data BPS menunjukkan kuintil terkaya memiliki peluang 9 kali lebih besar masuk perguruan tinggi dibanding kuintil termiskin (25,03% versus 2,79%). Demikian pula dengan akses digital, anak dari keluarga berpenghasilan rendah tiga kali lebih kecil kemungkinannya memiliki akses internet dibandingkan anak dari keluarga paling sejahtera.

Struktur wajib pajak di Indonesia memperlihatkan piramida ketimpangan yang tajam. Berdasarkan olahan data Sakernas BPS, dari total sekitar 122,1 juta tenaga kerja, terdapat sekitar 107 juta orang (87,7%) yang penghasilannya bahkan belum mencapai ambang kena pajak, yakni kurang dari Rp54 juta per tahun.

Di sisi lain, kelompok dengan penghasilan Rp60 juta–250 juta per tahun justru menjadi penopang utama penerimaan negara. Meski jumlahnya tidak sebanyak kelompok berpenghasilan rendah, mereka menyumbang sekitar **46% dari total setoran PPh 21**, menjadikan kelas menengah pekerja ini sebagai tulang punggung utama pajak penghasilan di Indonesia.

Kuintil terkaya memiliki peluang 9 kali lebih besar masuk perguruan tinggi dibanding kuintil termiskin (25,03% versus 2,79%).

Demikian pula dengan akses digital, anak dari keluarga miskin tiga kali lebih kecil kemungkinannya punya akses internet dibandingkan anak dari keluarga paling sejahtera.

Kategori	Range penghasilan	Jumlah orang*	Kontribusi PPh 21 (2024)**
Non Taxable	≤ 54000000	107.133.310	0%
Tarif 5%	$54,000,001 \leq x \leq 60 \text{ jt}$	5.811.070	1%
Tarif 15%	$60,000,001 \leq x \leq 250 \text{ jt}$	8.679.559	46%
Tarif 25%	$250,000,001 \leq x \leq 500 \text{ jt}$	351.837	13%
Tarif 30%	$500,000,001 \leq x \leq 5 \text{ miliar}$	161.313	34%

Sumber: Sakernas, diolah CORE Indonesia

* Jumlah orang adalah jumlah pekerja dihitung berdasarkan gaji tahunan sesuai bracket. Misalnya, untuk tarif 5% gaji tahunan berada pada rentang Rp54–60 juta

** *Share* terhadap total PPh 21 yang dibayarkan, dengan asumsi gaji diambil pada nilai tengah tiap bracket dan status TK0 (tanpa tanggungan).

Namun, yang lebih kontras lagi adalah kelompok dengan penghasilan di atas Rp1 miliar per tahun. Jumlahnya hanya sekitar 122 ribu orang atau 0,1% dari total wajib pajak, tetapi mereka berada di *bracket* tertinggi dan tetap memberi kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak. **Pola ini menunjukkan beban pajak sangat terkonsentrasi: mayoritas pekerja justru tidak masuk lapisan pajak, kelas menengah menanggung beban terbesar, dan kelompok super kaya mendominasi puncak piramida pendapatan nasional.**

Kondisi ini diperparah dengan kebijakan perpajakan yang secara tidak langsung memperkuat ketimpangan struktural. **Selama 2015-2025, berbagai fasilitas seperti *tax holiday*, *tax allowance*, pembebasan PPh dividen, dan program *tax amnesty* memberikan manfaat berlipat bagi kelompok berpendapatan tinggi.** Sebagai ilustrasi, seorang pemegang saham besar yang menerima dividen Rp10 miliar bisa menghemat Rp1 miliar melalui fasilitas perpajakan, sementara pekerja dengan saham ritel Rp10 juta hanya menghemat Rp1 juta.

Dalam konteks kebijakan pemerintah yang baru, **jika tidak didesain secara hati-hati, injeksi likuiditas 200 triliun rupiah justru berpotensi memperparah ketimpangan struktural yang sudah mengakar.** Di tengah permintaan kredit yang rendah, stimulus jumbo cenderung mengalir ke kelompok yang sudah memiliki akses keuangan lebih baik, yaitu kelompok berpendapatan tinggi dan korporasi besar.

B. Kemiskinan: Perbaikan Statistik versus Realitas Struktural

Penurunan tingkat kemiskinan nasional dari 8,57% menjadi 8,47% antara September 2024 hingga Maret 2025 kerap ditampilkan sebagai capaian keberhasilan. Namun di balik angka ini, terdapat realitas yang jauh lebih kompleks. Jumlah orang miskin relatif jauh lebih kecil dibanding kelompok rentan yang mencapai 54 juta jiwa, serta calon kelas menengah (CKM) sekitar 120 juta jiwa. Artinya, **lebih dari dua pertiga penduduk Indonesia hidup "hanya satu langkah" dari garis kemiskinan.**

Persoalan mendasar yang sering diabaikan adalah bahwa kemiskinan dan ketimpangan merupakan dua sisi mata uang yang sama, keduanya berjalan seiring dan saling memperkuat. **Kemiskinan bukan penyebab ketidakmerataan, melainkan manifestasi dari ketimpangan struktural yang mengakar dalam sistem ekonomi dan sosial kita.** Akar persoalan ketimpangan ini bersifat struktural, tercermin dari ketimpangan akses terhadap sumber daya, modal, dan kesempatan yang sistematis merugikan kelompok miskin.

Lebih mengkhawatirkan lagi, Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan mereka yang tetap berada dalam garis kemiskinan mengalami tekanan lebih berat untuk memenuhi kebutuhan paling dasar. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan statistik tidak otomatis sejalan dengan perbaikan kualitas hidup, bahkan menunjukkan lingkaran setan kemiskinan yang semakin mengakar. Lingkaran setan ini bekerja melalui mekanisme yang jelas, **pendapatan rendah menyebabkan daya beli (*demand*) yang rendah, yang kemudian menurunkan produktivitas karena minimnya investasi dalam kesehatan, pendidikan, dan modal usaha. Produktivitas rendah pada gilirannya melanggengkan pendapatan rendah, dan siklus ini terus berputar dari generasi ke generasi.**

Fenomena lingkaran setan kemiskinan ini juga tercermin dari pola konsumsi penduduk miskin yang menunjukkan penurunan kualitas. Proporsi pengeluaran untuk pangan naik akibat kenaikan harga bahan pokok, sementara pengeluaran untuk protein, pangan bergizi dan belanja non-makanan proporsinya dikurangi. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya akan memperpanjang siklus kemiskinan dan ketimpangan generasi berikutnya.

Disparitas wilayah memperjelas kontradiksi ini. Perdesaan mencatat penurunan 430 ribu jiwa miskin, namun di perkotaan jumlah penduduk miskin justru bertambah 220 ribu orang. Fenomena ini mengonfirmasi bahwa **transformasi struktural ekonomi tanpa jaring pengaman sosial memadai menjadikan perkotaan sebagai episentrum kerentanan baru.** Kondisi ini diperparah oleh tingginya tingkat informalitas di perkotaan. Informalitas ini akan berbanding lurus dengan kemiskinan, semakin tinggi informalitas pada rumah tangga, maka semakin tinggi juga kemiskinan (OECD, 2019).

Penanganan kemiskinan perkotaan perlu dicermati serius, sebab hampir setiap kali penambahan penduduk miskin, penduduk miskin di perkotaan relatif lebih cepat bertambahnya jika dibandingkan perdesaan. Sementara itu, penurunan kemiskinan di perkotaan relatif lebih lambat dibandingkan perdesaan. Ketersediaan pangan yang cukup dengan harga terjangkau menjadi hal krusial bagi penduduk perkotaan terutama bagi penduduk miskin.

Ironisnya, upaya penanganan kemiskinan masih terkendala oleh sistem data yang ketinggalan zaman. Digitalisasi data kemiskinan yang terintegrasi, presisi dan *real-time* menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan kebijakan berbasis bukti. Tanpa data yang akurat, mutakhir dan presisi, intervensi kebijakan akan terus bersifat reaktif dan parsial, tidak mampu memutus lingkaran setan kemiskinan-ketimpangan yang struktural.

Akar permasalahan terletak pada strategi kebijakan pengentasan kemiskinan itu sendiri. Lebih dari tiga perempat anggaran perlindungan sosial dialokasikan untuk bantuan sosial dan subsidi, menempatkan masyarakat miskin sebagai penerima pasif. Sebaliknya, program peningkatan pendapatan berkelanjutan yang dapat memutus lingkaran setan kemiskinan, melalui peningkatan produktivitas, akses modal, dan kesempatan ekonomi, hanya mendapat porsi kurang lebih sekitar 20%.

Akar permasalahan

terletak pada strategi kebijakan
pengentasan kemiskinan itu sendiri.

Lebih dari 75% anggaran perlindungan sosial dialokasikan untuk bantuan sosial dan subsidi, menempatkan masyarakat miskin sebagai penerima pasif. Sebaliknya, program peningkatan pendapatan melalui peningkatan produktivitas, akses modal, dan kesempatan ekonomi hanya dialokasikan sekitar 20%.

REKOMENDASI

Melihat berbagai persoalan struktural yang telah dipaparkan, diperlukan langkah kebijakan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu menjawab akar ketidakmerataan pembangunan di Indonesia dalam jangka panjang. Dengan kerangka itulah, rekomendasi berikut disusun untuk memberikan arah kebijakan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Pertama, pemerintah perlu mengintegrasikan kebijakan injeksi likuiditas dengan stimulus fiskal yang tepat sasaran untuk mendorong permintaan agregat. Injeksi likuiditas Rp200 triliun harus dibarengi dengan program fiskal yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong investasi produktif. Stimulus fiskal dapat berupa percepatan belanja infrastruktur dikombinasikan dengan kebijakan jangka pendek seperti program padat karya tunai, program bantuan langsung tunai yang lebih besar untuk kelas menengah ke bawah, dan insentif investasi yang terikat dengan penciptaan lapangan kerja formal.

Kedua, Indonesia perlu melakukan reformasi pajak yang lebih progresif. Untuk menjalankannya, pemerintah bisa memperluas basis pajak pada kekayaan, warisan, maupun *capital gain* atas aset finansial yang selama ini belum tergarap. Evaluasi terhadap insentif perpajakan seperti *tax holiday* dan *tax allowance* juga harus dilakukan agar manfaatnya benar-benar sepadan dengan potensi penerimaan negara yang hilang. Kebijakan *tax amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela tidak seharusnya terus diulang, melainkan digantikan dengan penguatan sistem informasi aset dan penegakan hukum yang konsisten.

Ketiga, kesenjangan akses pendidikan dan keterampilan harus dikurangi. Pemerintah perlu mendorong program vokasi berbasis industri di daerah tertinggal. Langkah serupa juga perlu diterapkan pada akses digital, misalnya melalui subsidi internet atau program kupon digital bagi keluarga miskin. Insentif berbasis *output* bagi operator telekomunikasi juga bisa mendorong perluasan layanan ke wilayah 3T.

Keempat, pemerintah perlu menyempurnakan peta jalan industri manufaktur seperti *Making Indonesia 4.0* dengan penyesuaian yang lebih terperinci untuk menyeimbangkan industri padat karya dan padat modal. Penyesuaian tersebut mencakup penambahan mekanisme *monitoring* tahunan yang ketat untuk memastikan penyerapan tenaga kerja tidak terganggu oleh otomatisasi Industri 4.0, yang dapat diintegrasikan dengan peta jalan transisi ketenagakerjaan nasional guna mengidentifikasi sektor yang rentan dan menghubungkan pekerja dengan pelatihan vokasi baru; perluasan dukungan pembiayaan melalui Kredit Industri Padat Karya (KIPK); integrasi hilirisasi dan dekarbonisasi untuk mencegah deindustrialisasi. Selain itu, kemitraan strategis antara industri besar dengan industri menengah dan kecil perlu diperkuat untuk memperluas rantai pasok sekaligus meningkatkan penciptaan lapangan kerja formal secara signifikan.

Kelima, selain mengandalkan investasi di industri besar, pemerintah juga perlu mendorong industri mikro dan kecil untuk naik kelas menjadi industri menengah dan besar. Pemerintah perlu menyusun strategi peningkatan daya saing dan melibatkan usaha mikro dan kecil dalam rantai pasok ekspor Indonesia. Dalam hal ini, strategi menaikkan kelas usaha mikro dan kecil perlu diintegrasikan dengan strategi perluasan pasar ekspor Indonesia dan strategi meningkatkan daya saing unit-unit usaha di Indonesia.

Keenam, memperluas perlindungan sosial untuk kelas rentan dan calon kelas menengah agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan. Intervensi tidak cukup dalam bentuk bantuan jangka pendek, tetapi perlu diarahkan pada program peningkatan pendapatan berkelanjutan melalui penciptaan lapangan kerja formal, penguatan dan *scale up* UMKM, industrialisasi lokal berbasis komoditas unggulan, pelibatan usaha masyarakat miskin dalam rantai pasok domestik dan perlindungan sosial adaptif seperti biaya energi, pendidikan, kesehatan yang terjangkau dan skema perlindungan kehilangan pekerjaan.

Ketujuh, Indonesia memerlukan pembangunan Sistem Informasi Kemiskinan Terpadu Digital (SIKTD) yang mengintegrasikan data *real-time* dari berbagai sumber yakni DTKS, kependudukan, perpajakan, BPJS, perbankan, hingga platform digital untuk menghasilkan profil kemiskinan multidimensional yang tidak hanya mengidentifikasi siapa yang miskin, tetapi juga memprediksi kerentanan rumah tangga terhadap guncangan ekonomi. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah memperbarui data langsung melalui aplikasi *mobile*, sementara algoritma *machine learning* secara otomatis mengarahkan penerima bantuan ke program pemberdayaan yang sesuai profil mereka.

Pemerintah perlu mengintegrasikan kebijakan injeksi likuiditas dengan stimulus fiskal yang tepat sasaran untuk mendorong permintaan agregat.

Injeksi likuiditas Rp200 triliun
harus dibarengi dengan program fiskal yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong investasi produktif.

PENANGGUNG JAWAB

Mohammad Faisal, Ph.D

PENASIHAT

Akhmad Akbar Susanto, Ph.D

Prof. Dr. Sahara, S.P., M.Si.

Dr. Etika Karyani

PENULIS

Yusuf Rendy Manilet, M.Ec.Dev

Azhar Syahida, MIntDevEc

Eliza Mardian, S.P., M.S.P

Achmad Hanif Imaduddin, S.I.P

DESAIN DAN PUBLIKASI

Agus Priyanto

Nando Purnama Aji

NARAHUBUNG PUBLIKASI DAN KERJA SAMA

Emma Efidayanti

☎ 0813-1408-0397

Publikasi ini dapat dikutip dengan menyebutkan CORE Indonesia

